

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indeks Pembangunan Manusia ialah faktor vital keberhasilan pengupayaan peningkatan kualitas hidup manusia, dengan adanya pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan angka pemenuhan kebutuhan primer masyarakat sektor kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi. Pemenuhan kebutuhan primer masyarakat terutama kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi adalah dasar bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat (*welfare*) dan pembangunan manusia (*human development*). sebagai mana yang diungkapkan dalam teori yang dikemukakan oleh Musgrave yaitu di tahap lanjut pembangunan terjadi pergantian kegiatan dari tahap awal (penyajian sarana & prasana), pendidikan, kesehatan dan layanan sosial untuk penduduk kurang mampu guna membangun kesejahteraan sosial. Teori Musgrave ini didukung pula oleh teori lingkaran setan kemiskinan menurut Nurkse yaitu adanya keterbelakangan serta rendahnya pengeluaran pemerintah atau ketersediaan modal maka akan berpengaruh kepada rendahnya produktifitas sumber daya manusia dan Teori Paul Romer dan Robert Lucas bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu cara dimana manusia dapat mengembangkan sumber daya manusianya karena sumber daya manusia berhubungan positif terhadap IPM. Lanjutnya, kemiskinan berkaitan dengan kesejahteraan, dikarenakan kesehatan dan pendidikan ialah indikator vital kesejahteraan masyarakat yang ingin diraih pemerintah (Indah, 2019).

IPM Provinsi Jawa Barat 2015 – 2019 secara umum terus bergerak positif selama periode 2015-2019. IPM di Provinsi Jawa Barat rata-rata tumbuh tinggi yaitu 0,95% pertahun sedangkan tahun 2015 kebawah hanya berstatus sedang. Meningkatnya IPM tidak terlepas dari peningkatan pada semua komponen pembentuk IPM, komponen tersebut adalah kesehatan, pendidikan, dan ekonomi Kenaikan IPM pada 2019 ialah hasil agregasi dari kenaikan faktor terbentuknya IPM (Yulistyne, 2020). Saat 2019, tiap bayi lahir mempunyai kemungkinan hidup sampai 72,85 tahun, yaitu 0,19 tahun lebih lama daripada tahun sebelumnya.

Artinya, anak usia 7 tahun mempunyai waktu sekolah sebanyak 12,48 tahun, yaitu lebih dari 0,03 tahun dibandingkan pada 2018. Namun, masyarakat usia 25 tahun memiliki masa pendidikan rata-rata 8,37 tahun. Naik 0,22 tahun sejak 2018, komponen belanja per kapita (harga konstan 2012) mencapai Rp. Tahun 2019 sebesar Rp 11,152 juta, meningkat Rp. Menghabiskan 362.000 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 – 2019 IPM Jabar meningkat dengan rangking 16 menjadi 10 besar dan di Provinsi Jawa Barat sudah mengalahkan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa timur karena *level to levelnya* hanya sama dengan Jatim dan Jateng (Sukmara, 2017).

Jawa Barat ialah salah satu provinsi terluas di Indonesia dan telah menarik perhatian lebih. Adapun persentasi kemiskinan di Jawa Barat pada 2019 sebesar 6,28%. Artinya masih lebih rendah dari angka kemiskinan nasional sebesar 9,22%. Sayangnya, angka ini masih merupakan rekor yang bagus karena berkontribusi begitu besar terhadap angka kemiskinan negara. Tingkat kontribusinya mencapai 13,79%, hanya dilampaui oleh Jawa Timur (16,72%) dan Jawa Tengah, peringkat ketiga dengan kontribusi 15,06% (Kavin, 2019). Secara persentase, kenaikan pada 2019 adalah yang tertinggi dalam 4 tahun terakhir. IPM Jawa Barat sempat menyentuh di atas 1% pada 2015, namun setelah itu persentase pertumbuhan IPM cenderung di bawa 1%, sedangkan pada tahun 2020 tidak di gunakan karena terjadinya pandemic di seluruh dunia terutama di Indonesia yang sangat mempengaruhi hampir ke segala sektor kehidupan, dan berpengaruh pula terhadap peningkatan IPM hasil kenaikan tersebut sangat tipis dan belum terbias dikarenakan pada tahun terakhir, IPM umumnya naik 0,5-0,6, namun tahun 2020 hal tersebut belum terjadi sebab IPM hampir konstan. Lambatnya pergerakan IPM saat 2020 sangat terpengaruh oleh menuurunya rerata pengeluaran perkapita (Khadijah, 2020).

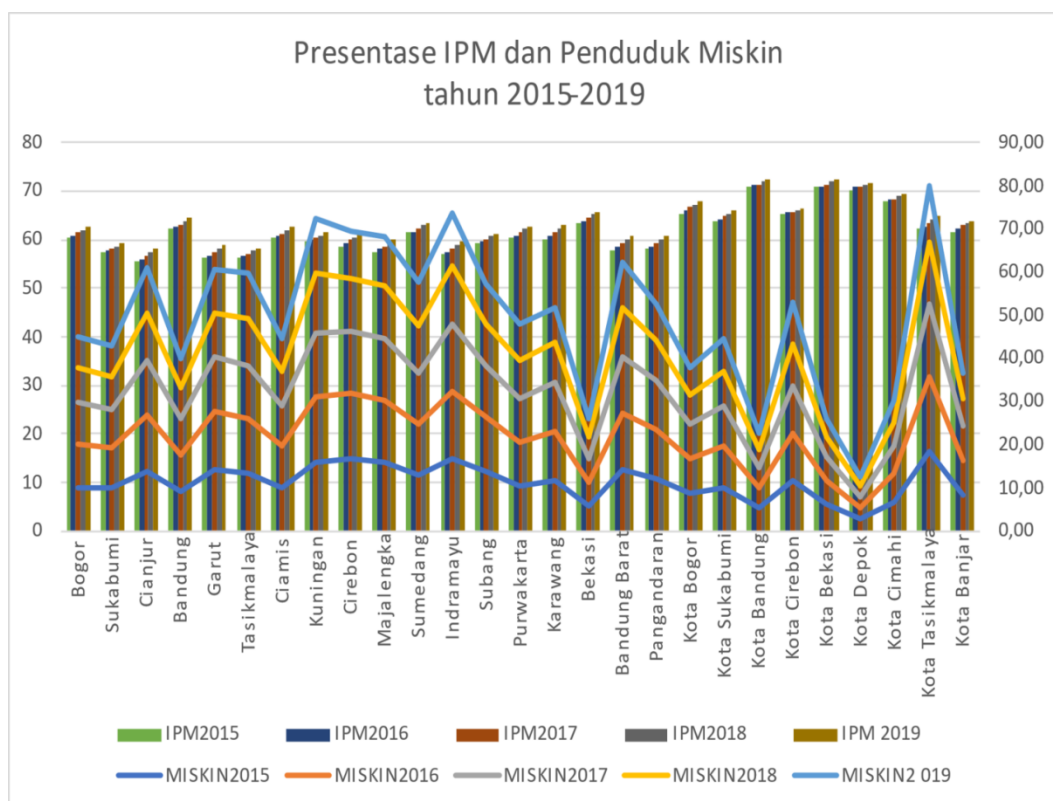
IPM Provinsi Jawa Barat 2015 - 2019 mengalami peningkatan pada 2015 sampai 2019, walaupun Provinsi Jawa Barat pada lima tahun belakangan, IPM-nya ada di peringkat 10 besar masih rendah oleh provinsi besar lainnya di Indonesia padahal Provinsi Jawa Barat memiliki keunggulan yaitu SDA yang banyak pada sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan tetapi pada masalah pembangunan manusianya seperti perbedaan kualitas sumber daya

manusia yang dimaksud yaitu tingkat pendidikan masyarakat Tasikmalaya, Ciamis, Kota Banjar, Purwakarta, Subang, Majalengka, Kuningan dan beberapa daerah yang berbeda, penduduk dengan pendidikan terakhir SMA atau kurang, sebagian penduduk hanya memiliki pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama atau dasar dan perbedaan tingkat kesejahteraan yang dimaksud adalah taraf dan tingkat kesehatan, beberapa daerah di Jawa Barat mempunyai angka mortalitas bayi yang tinggi yaitu Sukabumi, Tasikmalaya, Ciamis, Sumedang, dan Majalengka, dikarenakan oleh kesejahteraan umum di Provinsi Jawa Barat yang masih buruk, maka dengan investasi pengeluaran pemerintah baik berupa pendidikan maupun kesehatan yang berdampak kepada kemampuan wilayah guna menjalankan pembangunan manusia. Modal ini sangat dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kondisi daerahnya misal memperbaiki SDM, meningkatkan sarana umum dan sebagainya. Pengeluaran pemerintah juga bisa dijadikan penggerak untuk perekonomian daerah, maka sebab itu perbedaan total pengeluaran pemerintah dapat juga mengakibatkan perbedaan kinerja ekonomi daerah Provinsi Jawa Barat. Tingkat IPM yang tinggi nyatanya tidak menjadi jaminan naiknya kehidupan sebagian penduduk. Guna utama dari usaha pembangunan manusia tidak dilihat dari kemandirian daerah atau pertumbuhan GNP, pembuangan atau penurunan kebutuhan, penurunan pendapatan, penanggulangan SDM seperti memberi bantuan pendidikan, Kesehatan, bantuan sosial serta perluasan lapangan pekerjaan. Pembangunan wajib memperlihatkan perubahan keseluruhan masyarakat guna mencapai keadaan kehidupan yang lebih baik, baik materiil juga spirit (Anny & Euis, 2021).

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan di Provinsi Jawa Barat periode 2019 mencapai 43,36% setara dengan 15,698 triliun sedangkan tingkat Indeks Pembangunan Manusianya sebesar 72,03% yang cenderung mengalami peningkatan sebesar 0,73% dan memiliki trend positif dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 71,30% tetapi IPM Provinsi Jawa Barat masih terdapat dibawah IPM Indonesia sebesar 71,92. Hal tersebut menunjukkan kenaikan dana pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak menjadikan peningkatan presentase IPM menjadi naik secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan dengan teori Musgrave dan Rostow antara pengeluaran

pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan kemiskinan terhadap IPM di Provinsi Jawa Barat dapat menjadikann jawaban dan hasil atas polemik antara pengaruh pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan, Kesehatan dan kemiskinan terhadap tingkat IPM. Terlampir dibawah ini gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia dan Penduduk Miskin Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Barat 2015 - 2019.

Grafik 1. Indeks Pembangunan Manusia dan Penduduk Miskin Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Barat 2015 - 2019



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2020

Terlihat sajian grafik 1 dapat disimpulkan bahwa peningkatan IPM tidak serta merta memberikan dampak yang konsisten terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan perbedaan antar kelompok masyarakat dalam kegiatan ekonomi daerah yang berlangsung begitu besar. Mekanisme permasalahan di Provinsi Jawa Barat yaitu terkait masih rendahnya pembangunan manusia serta tingginya kemiskinan, walaupun angka kemiskinan turun di setiap tahunnya, tetapi Provinsi Jawa Barat tetap bertahan di urutan 10 besar dari 34

Adam Wahyu Setiawan, 2021

DETERMINASI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 – 2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Provinsi di Indonesia. Konsekuensinya daerah di Provinsi Jawa Barat masih menetap pada kelompok tengah pada soal ketercapaian IPM. Hal itu terjadi ketimpangan dalam akselerasi pembangunannya. Angka kemiskinan yang turun di Provinsi Jawa Barat tidak membuat IPM meningkat secara cepat kedua masalah ini, salah satu faktornya yaitu minimnya bantuan aset yang dibatasi. Sumber aset minim ini muncul dalam pengeluaran pemerintah yang umumnya rendah untuk mendanai area publik. Rendahnya animo masyarakat di Provinsi Jawa Barat disebabkan oleh rendahnya belanja pemerintah untuk daerah.

IPM Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Barat 2015 – 2019 mengalami kenaikan di 3 tahun terakhir, perkembangan tersebut merupakan hal positif bagi Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan SDM untuk IPM tertinggi ada Kota Bandung merupakan kota dengan IPM tertinggi yaitu Kota Bandung yang rata - rata mencapai 90%. Besaran IPM Kota Bandung di tahun 2015 sebesar 79.67%, 2016 sebesar 80.13%, 2017 sebesar 80.31%, 2018 sebesar 81.06%, 2019 sebesar 81,62% (Bps, 2019). Gerakan PKK berkontribusi aktif pada kenaikan IPM Kota Bandung. PKK mengerjakan kegiatan dimana meliputi kebutuhan dasar hidup manusia dari bayi hingga usia lanjut. PKK hal ini sangat membantu dalam hal aspek kesehatan, pendidikan dan daya beli adapun IPM terendah ada di Kabupaten Tasikmalaya rata - rata hanya mencapai nilai 65%. Besaran IPM Kabupaten Tasikmalaya yaitu IPM di Kabupaten Tasikmalaya yaitu di tahun 2015 sebesar 63.17%, 2016 sebesar 63.57%, 2017 sebesar 64.14%, 2018 sebesar 65%, 2019 sebesar 65,64% (Bps, 2019). dan anak sekolah Kabupaten Tasikmalaya serta penduduk dengan Rendahnya angka IPM di Kabupaten Tasikmalaya disebabkan oleh rendahnya tingkat Pendidikan karena Rendahnya kesadaran masyarakat, sarana pendidikan pendapatan perkapita rendah dan status kesehatan yang tidak seimbang, kurangnya sarana dan prasarana sanitasi, kurangnya air minum bersih untuk kesehatan sehari-hari, kurangnya terkait kesehatan dan gizi, dan infeksi Lingkungan sakit dan tidak sehat mengakibatkan kurangnya produktifitas kinerja SDM di daerah tersebut, Jarak dari pusat pemerintahan dan perekonomian serta keadaan penduduk dimana masih ada dibawah standar kemiskinan (Muliza, 2017).

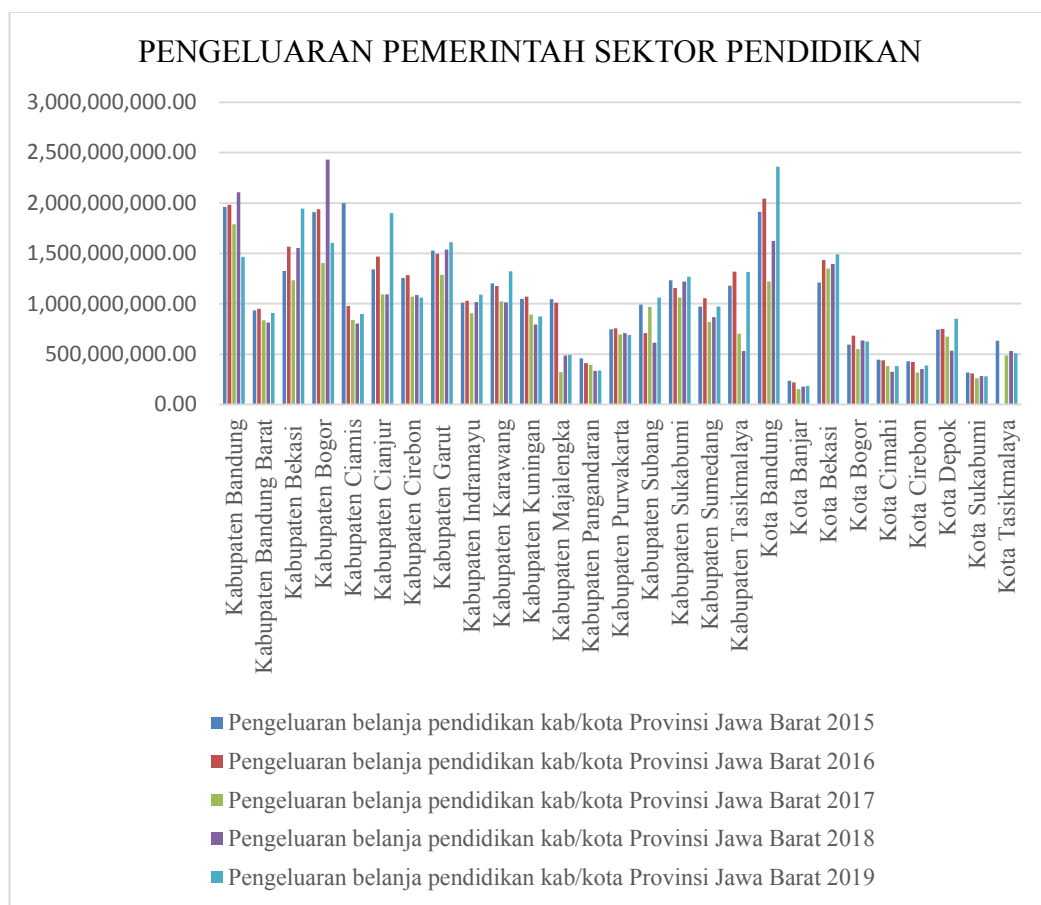
Terlihat dari sajian grafik 1 dapat disimpulkan, angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat 2015-2019 terus menurun, tetapi persentase warga miskin di Provinsi Jawa Barat masih terlihat banyak dikarenakan seperempat populasi nasional ada Provinsi Jawa Barat adalah salah satu provinsi berpendudukan miskin terbanyak. Kemiskinan dapat memiliki dampak yang benar-benar nyata pada peningkatan manusia sebab permasalahan kemiskinan yaitu masalah krusial yang benar berasal dari kemampuan beli orang yang belum dapat mengatasi masalah-masalah penting sehingga kebutuhan yang berbeda, misalnya, pendidikan dan kesejahteraan adalah diabaikan (Dewi, 2017). Hal ini membuat kesenjangan pembangunan manusia antara kedua-duanya sangat tinggi juga akhirnya sasaran IPM ditetapkan pemerintah belum terpenuhi secara memadai.

Kemiskinan di Jawa Barat telah berkurang karena pada 2015-2019, pemerintah daerah dan pemerintah pusat bekerja sama di era Presiden Joko Widodo untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui Proyek Keluarga Harapan, pangan nontunai dan bantuan sosial lainnya. Bantuan Bantuan, Beras Sejahtera, Dana Desa, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Penanggulangan kemiskinan sendiri baru muncul dalam beberapa tahun terakhir, meskipun dapat dikatakan bahwa laju pengentasan kemiskinan sangat lambat. Jika melihat angka kemiskinan di Jawa Barat tahun 2019 senilai 6,82%. Dimana masih berada di bawah garis kemiskinan nasional. (Ardian, 2019).

Persentase penduduk miskin yang terbesar yaitu ada di daerah Kota Tasikmalaya persentase penduduk miskinnya lebih besar dari pada kota dan kabupaten lainnya di Jawa Barat yaitu 11.6%. Kemiskinan, Kota Tasikmalaya benar terpengaruh oleh kemampuan beli. Di Kota Tasikmalaya, kemampuan beli masyarakat relatif kecil mengingat gaji individu masih kecil. Di Kota Tasik, sebagian kecil penghuninya justru bekerja di area informal, seperti pedagang kaki lima dan buruh industri rumah tangga. Upah buruh di Kota Tasikmalaya ini tidak mengikuti aturan UMR, berbeda dengan pabrik di daerah lainnya, maka jika sesuai undang-undang dan buruh bisa menuntut jika tidak sesuai. Di Kota Tasikmalaya, tidak terlalu banyak organisasi berskala besar bisa dikatakan bahwa daya beli yang rendah, upah yang rendah dan tidak adanya pekerjaan saling berkaitan yang membuat penduduk berada pada kategori miskin (Bayu, 2019).

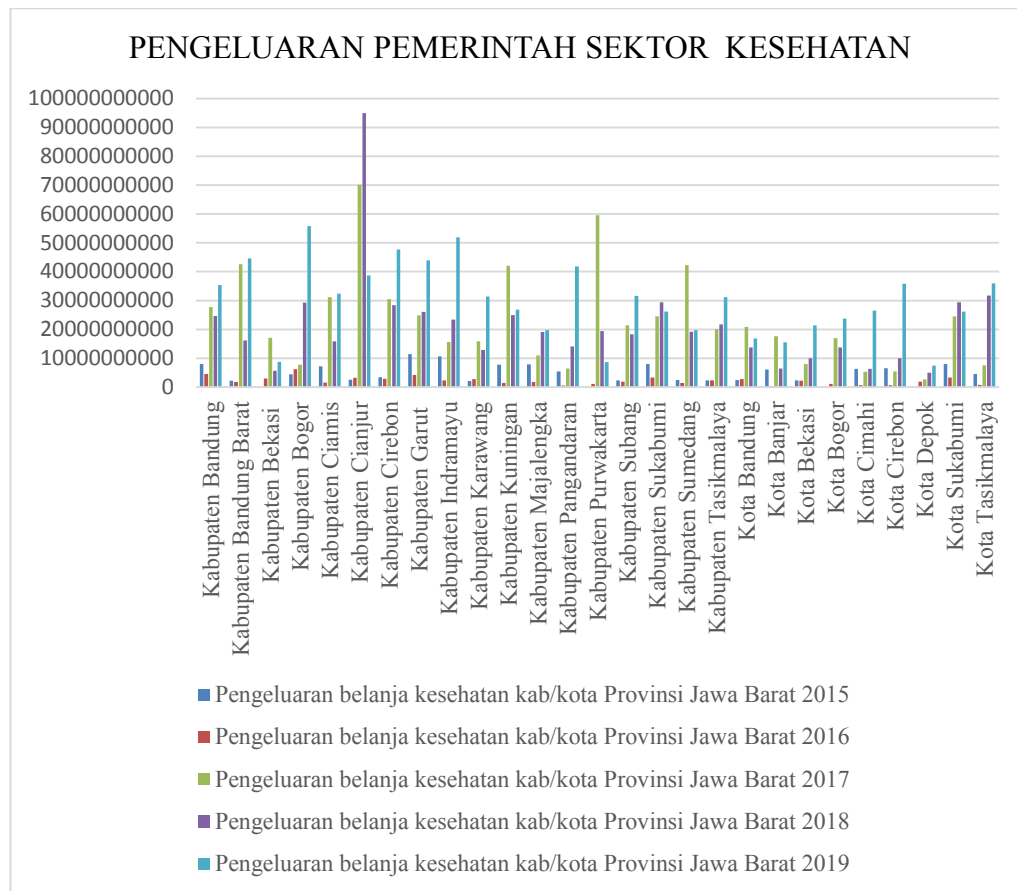
Persentase penduduk miskin terkecil yaitu ada di Kota Depok yaitu sebesar 2.07% disebabkan karena antara lain tingkat pendidikan yang layak, mayoritas masyarakat mengalami kesejahteraan, sehingga menimbulkan persaingan yang ketat di Kota Depok, dukungan Pemerintah Kota Depok memberikan kemampuan mempersiapkan, dan administrasi keuangan, dengan tujuan agar masyarakat dapat menekan biaya dan meningkatkan gaji. UMKM di Kota Depok juga berkembang pesat, terdapat banyak koperasi yang sehat secara konsisten, hingga berbagai komunitas dan kuliner yang bernilai sosial dan finansial. Cara menekan status kemiskinan di Kota Depok, kemandirian daerah sangat penting demi peningkatan pembangunan manusia. Masyarakat juga harus mengembangkan kreativitas dan inovasi serta didukung oleh bantuan pemerintah (Nurdiansyah, 2019).

Grafik 2. Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Barat 2015 – 2019



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2020

Grafik 3. Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Barat 2015 – 2019



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2020

Pada grafik 2 bisa dilihat bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Barat mengalami kendala seperti pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan yang berfluktuatif di tiap periodenya, sedangkan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan mengalami berfluktuatif di setiap tahunnya maka adanya ketimpangan di sektor pendidikan dan kesehatan Provinsi Jawa Barat dimana mengakibatkan masih adanya kualitas SDM yang masih rendah di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Barat karena mau sebanyak apapun SDA Provinsi Jawa Barat tidak akan terpengaruh pada pertumbuhan bangsa apabila tidak di kelola dan di bantu oleh orang yang tepat, tanpa adanya pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, maka cita – cita ingin menaikan IPM menjadi sia – sia. Hal tersebut menjadikan gap karena beberapa faktor penting dalam pembangunan tidak selamanya berhasil atau terorganisir

dengan baik untuk pembangunan manusia ialah pendidikan dan Kesehatan, komponen tersebut penting karena merupakan kebutuhan dasar manusia dimana harus dipunyai untuk membangun potensinya (Zulyanto, 2016).

Pengeluaran paling terbesar belanja Pendidikan di Kota Bandung dan Kabupaten Bogor alokasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 2.361.370.000 karena pemerintah Kota Bandung terfokus dalam kesejahteraan pengajar dan juga peningkatan infrastruktur Pendidikan hal itu tercermin dari alokasi anggaran yang di tingkatkan untuk kesejahteraan tenaga pendidikan dan kependidikan juga mencakup peningkatan bantuan dana hibah kepada tenaga pendidikan non – ASN lalu sarana dan prasarana Pendidikan di jenjang SD, SMP, SMA sampai dengan perkuliahan di Kota Bandung, sedangkan Kabupaten Bogor di daerah instruksi belum banyak mendapat perhatian, salah satu petunjuknya adalah tidak seimbang pendidikan jadi banyak penghuni yang tidak memperoleh pelatihan sebab jarak dan lainnya. Pemerintah Kabupaten Bogor mengetahui sekolah negeri di wilayahnya belum ada secara rata dan mencukupi total yang diperlukan dengan cara merevitalisasi kelas untuk menyeimbangkan kurangnya sekolah, nantinya menambah ruang kelas dari APBD 2019 kabupaten, provinsi dan pusat sebesar Rp. 2.429.340.000,00. Pengeluaran paling terkecil belanja pendidikan di Kota Banjar sebesar Rp 184.640.000 karena minat membaca buku masyarakat dan pelajar di Kota Banjar, terbilang masih rendah, betapa tidak, angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, tidak memberikan kontribusi maksimal dalam penilaian IPM. Penyebabnya tak lain karena belum dimasukkannya pendidikan non formal ke dalam penilaian sektor pendidikan. Masyarakat di Kota Banjar sebagian besar mempercayakan pendidikan anaknya ke pondok pesantren, sementara pondok pesantren masih dikategorikan pemerintah sebagai lembaga pendidikan non formal, lebih banyak pesantren dari pada sekolah pada umumnya dan kebanyakan pesantren di miliki oleh yayasan atau pribadi, yang mengakibatkan belanja pemerintah di Kota Banjar tidak terlalu banyak di sektor pendidikan (Iwan, 2019).

Pengeluaran belanja kesehatan paling banyak ada di Kabupaten Cianjur sebesar Rp. 70.139.000.000 karena pelayanan kesehatan bagi masyarakat harus menjadi prioritas dalam pemkab Cianjur di anggaran APBDnya. Sebab,

pemerintah daerah Kabupaten Cianjur telah mendorong untuk mewajibkan berbagai yayasan pemerintah dan swasta daerah untuk secara efektif berkepentingan mendukung pelaksanaan Program JKN-KIS dan menawarkan bantuan terbaik kepada masyarakat, dengan adanya CSR akan memberdayakan organisasi, manor, dan substansi bisnis lainnya untuk memiliki opsi untuk menyalurkannya sebagai hadiah untuk pendaftaran JKN-KIS bagi penduduk yang tidak mampu (Hardoko, 2017). Pengeluaran belanja kesehatan paling kecil ada di Kota Depok karena penganggaran kesehatan di Kota Depok masih kecil yaitu sebesar Rp. 7.409.990.000, sementara itu kebutuhan pelayanan kesehatan sangat tinggi, ini terlihat dari RSUD selalu penuh sesak, besaran anggaran kesehatan harus ditata lagi sehingga nilainya seimbang antara jumlah penduduk yang kian meningkat dan pembangunan kesehatan (Kamil, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Themby O. M. Palenewen, Een N. Walewangko, Jacline. Sumual pada tahun 2013 dengan judul pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia dan dampaknya terhadap kemiskinan di sulawesi utara, memiliki hasil hasil pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak signifikan serta sektor kesehatan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Berbeda dengan penelitian oleh Jehuda J.S. Mongan, Prof. Dr. Samsubar Saleh. M.Soc.Sc pada tahun 2018 dengan judul pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia, dan memiliki hasil pengeluaran pemerintah sektor pendidikan signifikan serta sektor kesehatan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Ditarik simpulan Provinsi Jawa Barat termasuk kedalam 10 besar yang menduduki IPM secara nasional, namun tingkat kemiskinan di Jawa Barat masih tinggi secara nasional, pendidikan serta kesehatan di Jawa Barat pun masih rendah dibanding dengan provinsi lainnya secara nasional, maka dari itu IPM Kab / Kota di Provinsi Jawa Barat sangat memfokuskan ke sumber daya manusia yaitu IPM karena dengan itu dapat mengukur keberhasilan pembangunan di daerah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat berupa bidang pendidikan dan kesehatan bertujuan pembangunan daerah, guna mendorong bidang

pendidikan dan kesehatan pemerintah Kab / Kota di Provinsi Jawa Barat dibutuhkannya anggaran, maka itu dukungan pemerintah dibutuhkan dalam melaksanakan sebagian pelatihan dari pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dimanfaatkan guna gambaran dari strategi nantinya dicetuskan oleh otoritas publik di daerah. Tingkat peningkatan memiliki tiga persyaratan mendasar, untuk lebih spesifik untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan harus berumur panjang, hidup sehat dan harus berintelektual dan memiliki pengetahuan yang luas, agar mempunyai akses kepada sumber kebutuhan supaya memiliki kehidupan secara layak (Zulyanto, 2016).

Kemiskinan di Kab / Kota di Provinsi Jawa Barat dengan penduduk paling banyak di Indonesia mengakibatkan lapangan kerja kurang merata dan salah satu bidang lain dimana menjelaskan kualitas hidup manusia di provinsi jawa barat yaitu standar hidup layak seperti tidak mampu di bidang ekonomi guna mencukupi kebutuhan primer dimana dilihat dari segi pengeluaran. Maka penduduk miskin merupakan faktor keberhasilan pembangunan (Sayifullah & Tia, 2016).

Bedasarkan uraian tersebut, maka diperlukannya penelitian mendalam yang diinginkan untuk menjadi saran juga penambahan literatur penelitian untuk meningkatkan IPM di kabupaten / Kota Provinsi Jawa Barat. Maka itu penulis tertarik melakukan penelitian ini berjudul “Determinasi Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 – 2019”.

I.2 Rumusan Masalah

Jenis pencapaian kemajuan dilihat dari perubahan IPM disuatu daerah. Kemajuan manusia ialah salah satu gambaran modal dengan tujuan akhir untuk berpartisipasi dalam peristiwa pembangunan nasional, maka diperlukan realitas otoritas publik dalam mengelola isu perluasan pergantian peristiwa manusia, salah satu pembuktian kesungguhan otoritas publik yaitu melalui pengeluaran pemerintah sebagai kesan bukti substansial dari pekerjaan otoritas publik di pemerintahan dalam perekonomian. Bidang penggunaan pemerintah yang sangat

signifikan dan mempengaruhi perbaikan manusia adalah konsumsi di sektor pendidikan dan kesehatan (Indah, 2019).

Permasalahan IPM Kabupaten/Kota Jawa Barat terkait dengan peningkatan distribusi pengeluaran publik di bidang pendidikan dan kesehatan, dan tidak setara bersama peningkatan pembangunan manusia dimana terlihat dalam IPM. penduduk miskin dibandingkan dengan daerah lain, tinggi terutama di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat, menurut uraian sebelumnya, rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ada pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana ada pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana ada pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat.

I.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan bisa digunakan meningkatkan ilmu dan pengetahuan tentang faktor yang berpengaruh terhadap IPM di pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan juga tingkat kemiskinan di Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat, juga diharapkan untuk sarana peningkatan ilmu pengetahuan diaman secara teoritis dilakukan di perkuliahan.

b. Manfaat Praktis

1) Pengambil Kebijakan

Penelitian diharapkan untuk sumber saran dimana memiliki guna untuk pemerintah Provinsi Kabupaten / Kota di Jawa Barat untuk pengambilan kebijakan pada masa mendatang juga sebagai referensi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

2) Bagi Penulis

Bisa dimanfaatkan untuk saran untuk peneliti lainnya yang jenis penelitiannya sejenis.